



**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2022– 2023
Masa Sidang	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Konsultasi
Hari/Tanggal	:	Senin, 27 Februari 2023
Sifat	:	Tertutup
Pukul	:	10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Jl. Raya Ir.H.Juanda, Gedangan, Sidoarjo – Jawa Timur.
Acara	:	Dalam rangka memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.
Ketua Rapat	:	H. Wahyu Sanjaya, SE., MM.
Sekretaris	:	Mardi Harjo, SE.,M.Si.
Hadir Pimpinan	:	1. H. Wahyu Sanjaya, SE 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Hadir Anggota	:	1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H. 2. Ir.Irwan Ardi Hasman
Hadir Tamu	:	Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kepala Auditorat, Anggota III dan V Pemeriksaan Keuangan Negara, Sekretaris Jenderal, Auditor Utama Keuangan Negara V, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional, Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan BPK RI.

KESIMPULAN / KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat Konsultasi dibuka oleh Ketua BAKN DPR RI, Bpk H. Wahyu Sanjaya, SE.,MM. pukul 10.00 WIB.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Konsultasi pada hari ini adalah dalam rangka memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada BPK RI sebagai narasumber untuk menyampaikan paparan terkait dengan tema rapat konsultasi yang dimaksud.

ISU-ISU STRATEGIS / CATATAN PENTING

1. Terkait upaya mengurangi temuan berulang, BPK berpendapat sebagai berikut.
 - a. perlu menyampaikan ke pimpinan entitas (termasuk dalam penilaian/indikator kinerja entitas).
 - b. mendorong komitmen pimpinan entitas bersama dengan Inspektorat agar permasalahan tidak berulang.
 - c. Peningkatan peran aparat/satuan pengawas intern. Jika terdapat unsur pidana, maka BPK akan melakukan pemeriksaan investigasi.
 - d. Perbaikan sistem pengendalian intern dan manajemen resiko.
2. BPK berpendapat bahwa sistem perjalanan dinas yang berlaku saat ini sudah cukup efektif dari aspek akuntabilitas keuangan namun yang perlu diperhatikan pada aspek efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas dikaitkan dengan tujuan, manfaat dan hasilnya apakah mendukung pencapaian tujuan/program entitas.
3. Selama ini pemeriksaan terhadap perjalanan dinas tidak dilaksanakan secara khusus tetapi menjadi bagian yang diperiksa dari pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Jakarta, 27 Februari 2023

KETUA RAPAT,



H. Wahyu Sanjaya, SE.,MM.